

Soal 1

Sebuah pemerintah daerah memperoleh opini WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut. Namun, hasil evaluasi BPKP menunjukkan maturitas SPIP masih berada pada Level 2 dan Inspektorat menemukan banyak temuan berulang yang belum ditindaklanjuti.

Pertanyaan:

Jelaskan mengapa kondisi tersebut dapat terjadi dan analisis perbedaan fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat dalam kasus tersebut.

Soal 2

Dalam audit investigatif proyek pembangunan bendungan senilai Rp2 triliun:

- Inspektorat menemukan indikasi penyimpangan administrasi.
- BPKP menghitung potensi kerugian negara sebesar Rp125 miliar.
- BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp97 miliar.

Pertanyaan:

Jika terjadi perbedaan nilai tersebut dalam pembahasan dengan DPR dan aparat penegak hukum, bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan masing-masing lembaga?

Soal 3

Presiden meminta evaluasi terhadap Program Strategis Nasional yang mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, dan tidak mencapai target manfaat.

Pertanyaan:

Mengapa penugasan tersebut lebih tepat diberikan kepada BPKP daripada Inspektorat atau BPK? Jelaskan dari aspek fungsi dan ruang lingkup kewenangan.

Soal 4

Dalam penerapan Three Lines Model pada kementerian:

1. Unit operasional mengelola risiko.
2. Unit manajemen risiko melakukan pemantauan.
3. Inspektorat melakukan audit internal.
4. BPKP melakukan quality assurance terhadap APIP.
5. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Pertanyaan:

Jelaskan posisi masing-masing pihak dalam kerangka tata kelola modern dan mengapa BPK tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem pengendalian intern pemerintah.

Soal 5

Sebuah kementerian mengalami kegagalan proyek digitalisasi nasional dengan nilai kontrak Rp4 triliun. Diketahui bahwa:

- Inspektorat telah memberikan peringatan sejak tahap perencanaan.
- BPKP telah mengidentifikasi risiko tinggi dalam evaluasi manajemen risiko.
- Pimpinan kementerian mengabaikan rekomendasi tersebut.
- BPK kemudian menemukan kerugian negara yang signifikan.

Pertanyaan:

Analisis kegagalan fungsi pengendalian berdasarkan peran BPK, BPKP, dan Inspektorat. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut?